Perencanaan untuk Monitoring pada Skema “Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial” di Kabupaten Tulungagung

Dicky Fernanda Putri ^{a*}, Lely Indah Mindarti ^b, Muhammad Shobaruddin ^c

^{abc} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 17 Oktober 2019

Revisi pertama tanggal: 08 Juli 2020

Diterima tanggal: 30 Juli 2020

Tersedia online tanggal: 24 Agustus 2020

Keywords: *planning for monitoring, social forestry, IPHPS scheme*

ABSTRACT

The modern forestry industry has led to the dissociation of the communities surrounding forests and deforestation, resulting in the Community welfare gap and loss of forest land cover. In overcoming this, the government issued a new policy of social forestry with IPHPS scheme that aims to provide the opportunity to the community around the forest to legally manage the forest in the working area of Perum Perhutani. This research aims to determine the planning of monitoring on IPHPS scheme in Tulungagung district that can be used to encourage in improving and strengthening the plan. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The results showed that stakeholders have not conducted any planning for monitoring so that, the author made monitoring planning based on the desired stakeholder results, fact field and monitoring planning UNDP (2009).

INTISARI

Industri kehutanan modern menyebabkan terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan dan deforestasi, sehingga berdampak pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan hilangnya tutupan lahan hutan. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu perhutanan sosial dengan skema IPHPS yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara legal di wilayah kerja Perum Perhutani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung yang dapat digunakan untuk mendorong dalam meningkatkan dan memperkuat rencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* belum melakukan perencanaan untuk monitoring sehingga, penulis membuat perencanaan monitoring yang didasarkan pada hasil yang diinginkan *stakeholder*, fakta lapangan, dan perencanaan monitoring UNDP (2009).

2020 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perhutanan sosial merupakan topik hangat dalam sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Istilah perhutanan sosial pada awalnya digunakan oleh J. W. B.

Sisam dalam Ninth Commonwealth Forestry Congress di Delhi, India pada Tahun 1968 dan mendefinisikan perhutanan sosial sebagai “*a forestry wich aims at production flow of protection and recreation benefits for the community*”. Istilah tersebut kemudian diperkenalkan

* Corresponding author. Tel.: +62-857-9026-7001; e-mail: vernandapcy@gmail.com

setelah Kongres Kehutanan Dunia ke VIII Tahun 1978 di Jakarta dengan diperkenalkannya konsep “*forest for people*”. Konsep ini kemudian diatur dalam PP. No 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dengan ideologi pengelolaan hutan berbasis negara (*state based forest management*) yang diinterpretasikan secara tunggal oleh pemerintah sebagai pengelolaan hutan berbasis pemerintah. Ideologi ini kemudian memunculkan model pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan *timber management* yang lebih memandang hutan sebagai sumber ekonomi dan meniadakan eksistensi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan tersebut. Kebijakan pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan swasta dan perusahaan negara untuk mengurus hutan negara yang berorientasi pada keuntungan daripada memberikan peluang hidup dan dipertahankannya nilai budaya masyarakat terhadap hutan.

Kebijakan tersebut menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hutan karena masuknya industri kehutanan modern yang bersifat ekspansif dan ekstensif. Menurut Zakaria (2018, p.16) industri kehutanan modern menjadikan terpinggirkannya masyarakat sekitar hutan dan mengakibatkan adanya ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan dan elit lokal) dengan masyarakat yang memang memiliki keterbatasan akses terhadap hutan. Tolo (2013, p. 243) juga menegaskan bahwa industri kehutanan modern juga mengakibatkan terjadinya laju kerusakan hutan atau deforestasi yang tinggi sehingga menyebabkan hilangnya tutupan lahan hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2017; sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam 44,1% hutan produksi, 12,7% hutan lindung dan 7,5% hutan konsevasi.

Kondisi ini menjadikan sebuah pemikiran baru untuk membuat pendekatan pengelolaan hutan yang lebih memberikan keseimbangan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi hutan. Didalam hal ini perhutanan sosial lahir dan mengambil peran kedepan untuk mengakomodir keinginan, hasrat, dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari. Pengembangan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif yang mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Salah satu strategi pemerintah dalam pengembangan perhutanan sosial untuk masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani atau disebut dengan Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan

Sosial (IPHPS). Skema ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara legal selama 35 tahun didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung diwilayah kerja Perum Perhutani yang memiliki tutupan lahan kurang dari 10% selama kurang lebih lima tahun berturut-turut. Kebijakan ini disambut dengan sukacita diberbagai daerah di Indonesia dan mendapat dukungan dari para aktivis lingkungan, salah satunya adalah di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung (2019), luas hutan Kabupaten Tulungagung adalah 39.071,2 Ha yang terbagi menjadi 29.609 Ha hutan produksi, 9.102,10 Ha hutan lindung dan 360,10 Ha hutan untuk penggunaan lain. Berdasarkan luas hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung, 6.687 Ha diantaranya dalam kondisi kritis, 10.034 Ha dalam kondisi agak kritis dan 871 Ha berpotensi kritis. Lahan kritis merupakan kondisi dimana lahan telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan, oleh karena itu hal ini harus segera ditangani agar tidak berdampak pada ekologi hutan. Dari jumlah lahan kritis di Kabupaten Tulungagung yaitu 6.687 Ha, 1.518,38 Ha sudah diajukan untuk masuk ke dalam program perhutanan sosial dengan skema IPHPS. Lahan tersebut berada di dua desa, yaitu Desa Besole dan Desa Tenggarejo. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung bersama dengan LSM PPLH Mangkubumi dan Kelompok Tani Hutan (KTH) bekerjasama dengan harapan program ini mampu untuk mengatasi permasalahan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari iktikad baik ini, maka dibutuhkan perencanaan yang didesain secara baik terutama pada kegiatan monitoring. Monitoring memiliki peran penting untuk mengetahui apakah kegiatan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan kontribusi positif terhadap setiap aspek kegiatan lainnya. Monitoring terkait erat dengan hasil dari rencana, sehingga perencanaan untuk monitoring menjadi kunci utama monitoring dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari perencanaan monitoring tersebut kemudian akan digunakan sebagai bahan acuan apakah informasi dari hasil monitoring yang akan dilaksanakan dapat digunakan untuk mendorong dalam meningkatkan dan memperkuat rencana. Hal ini dikarenakan, informasi dari monitoring yang dilakukan secara sistematis akan digunakan sebagai bahan penting dalam evaluasi. Suatu program akan sulit dievaluasi apabila tidak direncanakan dengan baik dan tidak

dilakukan monitoring secara sistematis dalam setiap perkembangannya (UNDP, 2009, p. 82).

2. Teori

2.1 Perencanaan untuk Monitoring

Menurut United Nations Development Programs (UNDP, 2009, p. 81) monitoring memiliki peran penting dalam mengetahui apakah hasil yang telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Monitoring terkait erat dengan hasil dari rencana. Didalam hal ini, monitoring didorong untuk mempertanggungjawabkan capaian hasil yang diinginkan dan memberikan fakta untuk digunakan dalam pengambilan keputusan korektif. Monitoring merupakan alat manajemen yang penting dalam mendukung komitmen terhadap akuntabilitas, sumberdaya, dan pembelajaran organisasi.

Monitoring memberikan peluang untuk memvalidasi logika program, kegiatan dan implementasinya untuk membuat penyesuaian apabila diperlukan. Didalam hal ini, monitoring memberikan informasi mengenai program yang sedang berlangsung yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan efektif dan tepat waktu. Perencanaan dengan desain yang baik tidak menjamin hasil yang diinginkan apabila informasi dari monitoring tidak dilakukan secara sistematis. Hal ini dikarenakan, proses monitoring dapat menghasilkan pertanyaan untuk dijawab ketika evaluasi, dan evaluasi mengacu pada data yang dihasilkan monitoring (UNDP, 2009, pp. 82-83).

Untuk mendapatkan informasi dari kegiatan monitoring, maka dibutuhkan kerangka kerja monitoring, sumberdaya monitoring, keterlibatan *stakeholder* dalam monitoring, dan kapasitas monitoring. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kegiatan monitoring, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Kerangka Kerja Monitoring

Kerangka kerja monitoring diperoleh dari kerangka hasil yang telah disepakati *stakeholder* dalam tahap perencanaan. Kerangka kerja ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai hal-hal berikut, yaitu sebagai berikut:

- a) Apa yang harus dimonitoring ?;
- b) Kegiatan apa yang perlu di monitoring ?;
- c) Siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan monitoring ?;
- d) Kapan kegiatan monitoring dilakukan ?;
- e) Bagaimana monitoring dilakukan ?; dan
- f) Sumberdaya apa yang dibutuhkan didalam kegiatan monitoring ?.

Kerangka kerja diatas menjadi gambaran umum serta penjelasan mengenai kegiatan monitoring yang akan dilakukan. Kerangka kerja tersebut juga menjadi

acuan kegiatan monitoring dilakukan, agar kegiatan yang berlangsung tetap pada perencanaan yang telah disepakati.

2.1.2 Sumberdaya Monitoring

Sumberdaya yang tidak memadai menyebabkan kualitas monitoring menjadi buruk. Untuk memastikan monitoring menjadi efektif dan memiliki kualitas yang baik, maka dibutuhkan sumberdaya monitoring yang memadai pada tahap perencanaan. Menurut UNDP (2009:90-91) sumberdaya monitoring terbagi menjadi dua, yaitu (a) Sumber daya keuangan dimana diharapkan memiliki jalur anggaran yang terpisah pada setiap kegiatan. Hal ini akan membantu *stakeholder* lebih realistis dalam penganggaran dan mengurangi resiko kehabisan sumber daya keuangan terutama pada kegiatan evaluasi yang berada pada tahap akhir; dan (b) Sumber daya manusia, dimana didalam monitoring harus memiliki staf khusus yang terlatih dibidang ini dan dipercayakan karena memiliki keahlian teknis. Kedua sumberdaya ini sangat penting untuk dipenuhi, karena akan membantu dalam mendapatkan hasil evaluasi yang diinginkan.

2.1.3 Keterlibatan Stakeholder dalam Monitoring

Stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan juga harus dilibatkan dalam proses monitoring. Hal ini dikarenakan, *stakeholder* yang terlibat dalam penetapan visi program digunakan untuk mengidentifikasi informasi atau memberikan umpan balik yang diperlukan selama implementasi yang juga akan menentukan parameter monitoring (UNDP, 2009, p. 93). Informasi dan umpan balik *stakeholder* ini digunakan untuk memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan hasil evaluasi.

Partisipasi *stakeholder* dalam monitoring juga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan dukungan dengan meminta keterlibatan *stakeholder* lainnya agar terlibat didalam program dan memobilisasi sumberdaya tambahan untuk mengisi kesenjangan sumberdaya (UNDP, 2009, p. 93). Partisipasi *stakeholder* dalam monitoring harus berkelanjutan, sehingga dapat dilembagakan dan menjadi lebih efektif.

2.1.4 Kapasitas Monitoring

Kapasitas monitoring pada umumnya berada pada tiga tingkat yaitu tingkat lingkungan yang memungkinkan, tingkat organisasi dan tingkat individu. Level kapasitas ini saling tergantung dan saling mempengaruhi melalui hubungan yang kompleks. Menurut UNDP (2009, pp. 96-97), kapasitas monitoring dapat diidentifikasi melalui empat indikator, yaitu (a) Pengaturan kelembagaan yang berisi tentang keselarasan data organisasi dengan data nasional, standar monitoring dan alokasi sumberdaya yang memadai pada masing-

masing kegiatan; (b) Kepemimpinan yang berisi tentang dukungan manajemen tingkat tinggi terhadap keputusan organisasi, (c) Pengetahuan yang berisi pemisahan informasi untuk menilai kemajuan program dan akses monitoring pada semua kegiatan; dan (d) Akuntabilitas yang berisi tanggungjawab para monitor memberikan informasi kepada manajemen tingkat tinggi secara tepat waktu. Keempat indikator tersebut dapat digunakan sebagai pengembangan kapasitas monitoring dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat permasalahan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang diinginkan.

3. Metode Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi secara mendalam terhadap persoalan kehutanan dan masyarakat desa hutan di Kabupaten Tulungagung;
- Melakukan identifikasi aktor dan peranan keterlibatan didalam Skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung;
- Melakukan analisis mengenai aturan yang berkaitan dengan kebijakan perhutanan sosial terutama Skema IPHPS;
- Melakukan *kroscek* data terhadap pihak-pihak yang terlibat didalam Skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung (melalui wawancara maupun observasi); dan
- Menghimpun data yang telah dikumpulkan berdasarkan fokus penelitian, melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Skema IPHPS antara lain: KPH Blitar, UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung, LSM PPLH Mangkubumi Kabupaten Tulungagung, KTH “Argo Makmur Lestari” Desa Besole dan KTH “Wonodadi Lestari” Desa Tenggerajo”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap para *stakeholders* yang terlibat dalam skema IPHPS, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi antara lain KPH Blitar, UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung, LSM PPLH Mangkubumi Kabupaten Tulungagung, KTH “Argo Makmur Lestari” Desa Besole, dan KTH “Wonodadi Lestari” Desa Tenggerajo”.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kerangka Kerja Monitoring

Kerangka kerja monitoring diperoleh dari kerangka hasil yang telah disepakati stakeholders dalam tahap perencanaan. Kerangka ini akan menjawab 5W+1H dari kegiatan monitoring yang akan diringkas dalam bentuk matriks perencanaan untuk monitoring. Berikut ini matriks perencanaan untuk monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks Perencanaan untuk Monitoring pada Skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung

Outcome	a) Mengurangi kemiskinan, deforestasi dan perubahan iklim serta konflik tenurial; b) Mewujudkan pemerataan ekonomi; dan c) Membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Output	a) Kawasan kritis menjadi produktif; b) Peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan; c) Pengurangan jumlah penebangan liar; dan d) Masyarakat desa hutan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari.
Indikator dan Area Monitoring	Pemberdayaan masyarakat desa hutan dan rehabilitasi lahan kritis
Kegiatan Monitoring dengan Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data kegiatan monitoring IPHPS dilakukan dengan survei lapangan, bertemu dengan <i>stakeholders</i> yang bersangkutan dan ikut didalam setiap kegiatan.
Waktu/ Jadwal	Monitoring dilakukan setiap 1-6 bulan sekali, dan tergantung pada kebutuhan praktis kegiatan
Tanggungjawab	Pengumpulan dan verifikasi data dilakukan oleh LSM PPLH Mangkubumi dan di monitoring oleh UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung.
Sarana Verifikasi	Sumber dan data ditemukan pada lokasi yang mengikuti skema IPHPS dalam hal ini adalah Desa Besole dan Desa Tenggerajo

Sumberdaya	<p>a) Sumber daya manusia dalam monitoring kegiatan adalah Direktur Jenderal dengan melibatkan Pokja PPS dan Perum Perhutani dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan dalam hal ini adalah UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung; dan</p> <p>b) Sumber daya keuangan berasal dari APBN, APBD, pinjaman pembiayaan pembangunan hutan, dana desa dan sumber lain yang sah secara peraturan perundang-undangan.</p>
Risiko	Partisipasi <i>stakeholders</i> pasif, terjadinya dominasi aktor atau ketidaksepahaman antar aktor sehingga tidak mencapai kesepakatan bersama yang berujung pada konflik menyebabkan kegiatan monitoring terhambat.

Sumber: UNDP (2009, p. 85)

Pada tabel diatas dijelaskan secara rinci mengenai harapan dari hasil evaluasi dalam bentuk *outcome* dan *output*, kegiatan yang akan dimonitoring serta risiko dalam skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung. *Outcome* dan *output* penting untuk dilakukan monitoring karena *outcome* dari skema IPHPS menjelaskan dampak dari *output* yang diinginkan, sedangkan *output* yang diinginkan merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Kedua hal tersebut sangat terkait satu sama lain dan diperlukan monitoring secara bersama. Risiko juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan monitoring karena risiko merupakan asumsi yang tidak diinginkan yang dapat menghambat kegiatan monitoring karena dapat menuai konflik baik internal maupun eksternal, sehingga dapat menjadi penyebab hasil evaluasi yang tidak diinginkan.

4.2 Sumberdaya Monitoring

Sumber daya keuangan pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung didapatkan dari APBN, APBD, pinjaman pembiayaan pembangunan hutan, dana desa dan sumber lain yang sah secara peraturan perundang-undangan. Namun, belum dapat diketahui mengenai anggaran yang terpisah yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan, oleh karena itu sumber daya keuangan untuk kegiatan monitoring belum dapat diidentifikasi. Anggaran terpisah yang dimaksudkan disini terkait dengan anggaran komprehensif, dimana pada tahap perencanaan mengenai anggaran sudah dituliskan secara menyeluruh dan lengkap baik dari anggaran operasional maupun anggaran keuangan dalam periode waktu tertentu. Anggaran ini akan mempermudah dalam

evaluasi dan lebih dinamis dalam pelaksanaan kebijaksanaan manajemen.

Sumber daya manusia untuk kegiatan monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan Pokja PPS dan Perum Perhutani dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan dalam hal ini adalah UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kabupaten Tulungagung. Secara garis besar sumber daya manusia ini sudah dipilih berdasarkan lembaga yang berperan untuk pembangunan kehutanan negara, namun secara mendalam belum diketahui mengenai individu yang terlibat didalamnya dalam kategori profesional dibidangnya atau bukan. Didalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia terkait monitoring kegiatan IPHPS di Kabupaten Tulungagung belum dapat diketahui apakah sudah dalam kategori *the right man in the right place*, sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk hasil yang diinginkan.

4.3 Keterlibatan Stakeholders dalam Monitoring

Pada kegiatan monitoring skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung, direncanakan akan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses perencanaan. Partisipasi seluruh *stakeholders* ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas monitoring melalui *sharing* informasi dan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan dalam membandingkan dan memecahkan masalah. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong rasa kepemilikan masing-masing *stakeholders*, sehingga dapat meningkatkan kinerja kelompok. Partisipasi seluruh *stakeholders* dalam monitoring juga membangun rasa kepercayaan antar *stakeholders* karena *stakeholders* mengetahui proses secara menyeluruh mengenai hal baik maupun hal buruk dalam skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung.

4.4 Kapasitas Monitoring

Kapasitas monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung dikategorikan pada empat indikator, yaitu pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan akuntabilitas. Keempat indikator tersebut dapat menghasilkan pengembangan kapasitas monitoring yang berguna dalam mengambil pandangan yang lebih holistik dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kapasitas monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung akan dijelaskan masing-masing secara lebih rinci dibawah ini.

4.4.1 Pengaturan Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan IPHPS pada tingkat nasional masih mengalami banyak kendala sehingga berdampak pada kelembagaan IPHPS di Kabupaten Tulungagung. Panjangnya rantai perizinan dimulai dari tingkat KTH hingga ketingkat menteri memerlukan

waktu berbulan-bulan hingga tahunan untuk mendapatkan izin legal pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan ini juga menyebabkan permasalahan lain seperti perizinan ganda pada wilayah yang sama, seperti yang terjadi pada IPHPS di Desa Tenggarejo yang mengalami izin ganda dilahan yang sama antara KTH Wonodadi Lestari dengan KPH Blitar dimana KLHK menyetujui lahan seluas 705,53 Ha untuk masuk ke dalam skema IPHPS, namun disisi lain juga menyetujui untuk dikerjasamakan dengan PTPN X untuk penanaman tebu. Kesalahan dalam pemberian izin ganda ini menyebabkan terhentinya kegiatan perencanaan IPHPS dan alokasi pemborosan pada biaya dan waktu kelompok karena pengurusan izin yang lama dengan rantai yang rumit.

4.4.2 Kepemimpinan

Pengambilan keputusan pada skema IPHPS berdasarkan pada P.39/MENLHK/2017 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Berdasarkan pada paradigma perhutanan sosial yang mengedepankan pendekatan partisipatif masyarakat, sehingga keputusan hasil monitoring terkait IPHPS di Kabupaten Tulungagung diharapkan berdasarkan pada pertimbangan fakta-fakta dilapangan yang dilakukan oleh tim monitoring. Dukungan keputusan berdasarkan fakta dilapangan ini akan lebih mengatasi permasalahan secara tepat, daripada menggunakan keputusan secara umum. Karena bagaimanapun setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda tergantung pada kondisi daerah tersebut.

4.4.3 Pengetahuan

Informasi penting mengenai kemajuan IPHPS di Kabupaten Tulungagung baik dari segi *output* maupun *outcome* dan risiko yang mungkin dihadapi, dipisahkan untuk menganalisis kinerja program. Misalnya informasi terkait perbedaan persepsi masyarakat mengenai akses legal pemanfaatan hutan selama 35 tahun, dimana masyarakat memahami akses legal tersebut sebagai bentuk kepemilikan tanah. Informasi penting seperti ini harus dipisahkan karena membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat. Selain itu, kegiatan monitoring diharapkan mampu mengakses ke semua program IPHPS sehingga pelaksanaan program dapat lebih terkendali dan tetap sesuai dengan perencanaan.

4.4.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam IPHPS di Kabupaten Tulungagung penting dilakukan karena dapat mendorong diri seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan penuh tanggungjawab. Misalnya informasi yang didapatkan pada kegiatan monitoring harus diberikan tepat waktu sesuai dengan peraturan, yaitu satu atau enam bulan sekali kepada Dirjen PSKL agar dapat mengambil

keputusan berbasis fakta dan dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat apabila ditemukan sebuah permasalahan dilapangan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* belum melakukan perencanaan untuk monitoring, sehingga penulis membuat perencanaan monitoring yang didasarkan pada hasil yang diinginkan *stakeholder*, fakta dilapangan dan perencanaan monitoring UNDP (2009), yaitu sebagai berikut:

- a) Kerangka kerja monitoring yang menjawab 5W+1H dari kegiatan monitoring yang diringkas dalam bentuk matriks perencanaan untuk monitoring;
- b) Identifikasi sumber daya keuangan dan sumber daya manusia secara umum, karena belum ada keputusan secara rinci mengenai sumberdaya ini;
- c) Pada kegiatan monitoring skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung, direncanakan akan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses perencanaan; dan
- d) Kapasitas monitoring pada skema IPHPS di Kabupaten Tulungagung di kategorikan pada empat indikator, yaitu sebagai berikut:
 - Pengaturan kelembagaan IPHPS pada tingkat nasional masih mengalami banyak kendala, sehingga berdampak pada kelembagaan IPHPS di Kabupaten Tulungagung, terutama pada perizinan;
 - Pengambilan keputusan pada skema IPHPS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Keputusan hasil monitoring terkait IPHPS di Kabupaten Tulungagung diharapkan berdasarkan pada pertimbangan fakta-fakta dilapangan yang dilakukan oleh tim monitoring;
 - Informasi penting mengenai kemajuan IPHPS di Kabupaten Tulungagung baik dari segi *output* maupun *outcome* dan risiko yang mungkin dihadapi, diharapkan dapat dipisahkan untuk menganalisis kinerja program; dan
 - Informasi yang didapatkan pada kegiatan monitoring harus diberikan tepat waktu sesuai dengan peraturan, yaitu satu atau enam bulan sekali kepada Dirjen PSKL agar dapat mengambil keputusan berbasis fakta dan dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat apabila ditemukan sebuah permasalahan dilapangan.

Daftar Pustaka

- J.W.B. Sisam. (1968, January). *Ninth Commonwealth Forestry Conference*. Diakses dari <https://pubs.cif-ifc.org/doi/pdf/10.5558/tfc44022-6>

- Tolo, Emilianus Y. S. (2013). Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(3), pp. 234-249.
- UNDP. (2009). *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. USA: UNDP.
- Zakaria, R. Yando. (2018). *Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program (Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial)*. Jakarta: Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.